Kontraversi *Foreign Direct Investment* dan Solusinya Bagi Negara

Silsila Asri¹

Abstract

Foreign Direct Investment (FDI) is one of the essential capital sources for developing countries which provide large contribution in economic development through transfer of asset, good corporate governance and especially technology. This expectation is not always provide positive impact to the recipient countries. FDI, which is often implemented in Multi National Corporation, also becomes a tool for the developed countries to control the economic activities in developing countries in pursuing their benefit and interest. Sometimes, those MNCs also have a significant influence in political activities of recipient countries. Beside that, MNCs not always provide large attention to the community development. From this condition, debate about the role of state in managing of FDI emerged in political economic discourses. This paper describes about one of alternative thought how state copes with globalization. FDI is one of phenomena which emerged as the consequences of globalization. Ian Clark suggested two perceptions about the relation of state and globalization. First, globalization has significant implication in eroding the state capacity as economic actor in international stage. Second, state is the key element in globalization process, in this perception there is a position shift of the state from state retreat to state adaptation. This paper conclude that, state also has capacity to control FDI and globalization which accompanied its flow. State must place itself as business actor which has competitiveness.

Keywords: *Foreign Direct Investment, Globalization, State retreat, state adaptation*

¹ Dosen di Universitas Andalas. Untuk tujuan akademik penulis dapat dihubungi di email : la_tansa2003@yahoo.com

Perdagangan tidak hanya salah satu bentuk aktivitas ekonomi internasional yang berkembang dengan pesat. Pada saat yang bersamaan juga terjadi perluasan ikatan finansial dinatara entitas ekonomi internasional. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah memudahkan hubungan antara sesama manusia, sehingga tidak lagi dibatasi oleh perbedaan ruang dan waktu antar wilayah yang berbeda. Batas-batas wilayah suatu negara mulai mengabur dalam saling hubungan tersebut. Era inilah yang disebut dengan globalisasi dimana hampir tidak ada kendala-kendala artifisial dalam pertukaran ekonomis antar negara, akibatnya arus barang, modal dan penduduk lintas negara mengalami intensitas yang sangat tinggi.

Kavaljit Sigh memberikan lima karakteristik perkembangan globalisasi dewasa ini yaitu;

“...1) Pertumbuhan yang pesat dalam transaksi keuangan

Internasional. 2) Pertumbuhan pesat dalam bidang perdagangan, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional. 3) Gejolak investasi Asing. 4) Teknologi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin canggih. 5) Munculnya pasar global.”¹

Salah satu ukuran globalisasi adalah aliran modal yang telah menjadi tiga kali lipat selama tahun 1980-an dan terus tumbuh pada era 1990-an. Sebagai contoh misalnya *lending* lintas batas yang dilakukan oleh bank-bank internasional berkisar \$324 milyar selama tahun 1980-an, meningkat menjadi \$7,5 triliun pada tahun 1991 dan selama rentang waktu tersebut transaksi dalam ekuitas juga

¹ Kavaljit Singh, *Memahami Globalisasi Keuangan, Panduan untuk Memperkuat Rakyat*, Terj. Fredrick Ruma (Jakarta : Yakoma-PGI, 1998), hal : 7

meningkat dengan rata-rata 28 % per tahun.²

FDI (*foreign direct investment*) merupakan salah satu bentuk aliran modal yang terjadi yang dilakukan oleh negara-negara industri maju di negara-negara berkembang. FDI menjadi salah satu sumber pembiayaan (modal) yang penting bagi negara berkembang, dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer asset dan manajemen, serta transfer teknologi guna mendorong perekonomian negara. Namun FDI yang sering diwujudkan dalam bentuk perusahaan multinasional ini seringkali dianggap kontraproduktif terhadap pencapaian pemerataan kesejahteraan di negara-negara berkembang tersebut dan dianggap tidak mengubah posisi negara berkembang terhadap negara-negara maju.

Pertumbuhan pesat perusahaan-perusahaan multinasional dan gejala

investasi asing sebagaimana yang dikemukakan oleh Kalvajt Singh di atas merupakan fenomena yang muncul sebagai hasil dari rekomendasi program pembangunan terhadap negara-negara berkembang. Logika dasar dari kegiatan investasi asing di negara-negara berkembang sangat positif yakni untuk membantu pembiayaan program pembangunan dimana negara berkembang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembentukan modal (*capital formation*) sebagaimana yang telah lebih dahulu dilakukan oleh negara maju. Program pembangunan yang dimaksudkan adalah suatu proses dimana negara berkembang yang dominan sebagai pengekspor *raw material* beralih menjadi negara industri dengan bantuan investasi modal dari negara-negara industri maju.

Paper ini bertujuan untuk memaparkan *critical review* terhadap arus penanaman modal asing langsung (FDI) sebagai sebuah bentuk pembiayaan pembangunan bagi negara-negara

²George C. Lodge, George C. Lodge, *Managing Globalization in The Age of Interdependence* (Johannesburg : Pfeiffer Company) hal. 2

berkembang di tengah derasny arus globalisasi. Pertanyaan mendasar yang diajukan adalah mengapa negara berkembang membutuhkan FDI?. Bagaimana kontroversi yang ditimbulkan oleh FDI dan Apa solusinya bagi negara berkembang untuk mengatasi konsekuensi FDI yang kontraproduktif tersebut.

Kebutuhan Foreign Direct Investment di Negara Berkembang

Pertanyaan pertama di atas yakni mengapa negara berkembang membutuhkan aliran modal asing? Secara sederhana jawabannya adalah negara berkembang tidak memiliki modal yang cukup untuk membiayai program pembangunannya dan negara berkembang juga tidak memiliki keahlian teknologi untuk membangun industrinya. Namun secara ilmu ekonomi hal ini dijelaskan dengan alasan bahwa kesulitan negara berkembang sehubungan dengan kegiatan perdagagannya adalah masalah deficit transaksi berjalan. Deficit transaksi berjalan ini dapat ditutupi dengan

peningkatan arus modal masuk (*capital inflow*).

Stabilitas keuangan suatu negara akan terlihat pada neraca pembayarannya (*balance of payment*). Neraca pembayaran adalah sebuah neraca yang mencatat semua arus keuangan yang ditimbulkan dari kegiatan perdagangan suatu negara. Neraca pembayaran secara khusus dirancang untuk merangkum semua transaksi finansial penduduk (pelaku ekonomi secara keseluruhan, termasuk pemerintah) dari suatu negara dengan keseluruhan pelaku ekonomi dari negara lain. Neraca ini terdiri dari tiga komponen utama. Pertama, neraca transaksi berjalan (*current account*) yang mencatat transaksi ekspor dan impor (barang maupun jasa), pendapatan investasi, pembayaran cicilan dan pokok utang luar negeri. Kedua, neraca modal (*capital account*) yang mencatat nilai investasi pihak swasta asing baik secara langsung (FDI), terutama yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, dan untuk mencatat semua bentuk

pinjaman luar negeri. Selajutnya yang ketiga adalah neraca tunai (*cash account*) atau yang lebih sering disebut cadangan devisa negara yang merupakan transaksi penyeimbang.³

Situasi keuangan internasional suatu negara terlihat pada catatan neraca pembayaran dan cadangan devisanya yang senantiasa tidak hanya tergantung pada saldo neraca transaksi berjalan (yakni segenap nilai netto perdagangan komoditi atau berbagai produk barang dan jasa), akan tetapi juga bergantung pada saldo neraca modalnya (yaitu saldo transaksi keluar masuk sumber-sumber keuangan pemerintah dan swasta). Negara-negara berkembang yang bukan pekspor minyak biasanya sering mengalami deficit dalam neraca perdagangan mereka, sehingga pemasukan modal asing yang lebih besar ke negara tersebut dibandingkan modal yang keluar secara berkesinambungan

merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam strategi pembangunan jangka panjang negara-negara tersebut.⁴

Arus modal asing berperan untuk menutupi gap devisa yakni kesenjangan antara target devisa yang dibutuhkan dengan hasil actual devisa yang dihasilkan dari ekspor. Selain itu juga mampu menggerakkan kegiatan perekonomian yang lesu akibat kurangnya modal (*saving investment gap*) bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Arus sumber keuangan internasional dapat berwujud dalam dua bentuk. Pertama, adalah penanaman modal asing secara langsung (FDI) dan investasi portfolio (yang dilakukan oleh pihak swasta asing). Sedangkan bentuk yang kedua adalah bantuan luar negeri.

Foreign Direct Investment (FDI) dinilai sebagai suatu bentuk arus modal asing yang memiliki konsekuensi kecil dibanding arus modal lainnya. FDI oleh Michael P. Torado dimaknai sebagai dana-

³ Toradp, Michael P. 1998. *Economic Development/sixth edition*. Terj. Haris Munandar. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Jakarta : Erlangga) hal. 103

⁴ Ibid hal. 144

dana investasi yang langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku dan sebagainya.⁵ Oleh karena itu FDI ini seringkali diimplementasikan dalam wujud perusahaan multinasional (Multinational Corporation, MNC). MNC merupakan perusahaan-perusahaan raksasa yang menjalankan, memiliki serta mengendalikan operasi bisnisnya di lebih dari suatu negara. Dalam term MNC ini muncul istilah *Home Country* (negara induk, biasanya negara maju) dan *Host Country* (negara tempat beroperasinya perusahaan).

Pandangan positif terhadap penanaman modal asing dan juga bantuan luar negeri pada umumnya berasal dari pandangan ekonomi neoklasik tradisional. Pandangan ini berargumen bahwa penanaman modal asing mampu mengisi

kekurangan tabungan yang dihimpun dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar penerimaan pemerintah dan mengembangkan keahlian managerial bagi perekonomian di negara penerimanya.

Michael P. Torado lebih lanjut mengemukakan beberapa sumbangan positif dari FDI terhadap pembangunan. adalah sebagai berikut :

1. Mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah actual tabungan domestic yang dapat dimobilisasikan.
2. Mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan dan hasil-hasil actual devisa dari ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri neto (kesenjangan perdagangan luar negeri)
3. Modal swasta asing dapat mengisi kesenjangan antara target penerimaan pajak pemerintah dan jumlah pajak actual

⁵ Ibid hal. 145

4. Modal Swasta asing dapat mengisi kesenjangan di bidang manajemen, semangat kewirasastaan, teknologi produksi, dan keterampilan kerja yang menurut pemikiran neoklasik akan diisi sebagian maupun seluruhnya oleh perusahaan-perusahaan swasta asing yang beroperasi di negara berkembang bersangkutan.⁶

Harapan terbesar negara penerima FDI adalah selain membantu pembiayaan pembangunan juga adanya transfer teknologi. Perusahaan multinasional tersebut tidak hanya menyediakan sumber-sumber finansial dan pabrik-pabrik baru saja kepada negara tuan rumah akan tetapi juga menyediakan suatu paket sumberdaya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalaman dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirswastaan, serta injeksi teknologi produksi, yang kemudian dapat dialihkan kepada mitra-

mitra usaha di dalam negeri melalui program pelatihan dan belajar sambil bekerja.

Dengan alasan-alasan tersebutlah negara-negara berkembang berupaya membangun kondisi yang kondusif untuk menarik investasi asing pada awal tahun 1970-an. Kondisi inilah yang memicu sebagian besar negara berkembang untuk meliberalisasi ekonominya. Investasi asing akan selalu tertuju ke negara-negara atau kawasan yang menjanjikan tingkat hasil finansial dan kadar kepastian paling tinggi (tingkat risikonya kecil).

Kontroversi Foreign Direct Investment

Suatu hal yang harus disadari dalam menilai kontribusi FDI terhadap pembangunan adalah bahwa perhatian perusahaan-perusahaan multinasional secara nyata lebih tertuju kepada upaya maksimalisasi keuntungan atau tingkat hasil finansial atas setiap sen modal yang mereka keluarkan. Perusahaan multinasional atau pemilik modal swasta

⁶ Ibid hal. 152

asing tidak tertarik untuk menunjang usaha pembangunan yang tidak akan memberikan keuntungan bagi mereka. Hal inilah yang menjadi alasan bagi para pemilik modal untuk mengalirkan dana mereka ke wilayah yang tingkat resikonya kecil. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pencapaian keuntungan yang diinginkan oleh para pemilik modal tersebut terkadang akan mengabaikan peningkatan kesejahteraan lokal, penduduk penerima.

Thomas Oatley setuju bahwa modal swasta asing berguna untuk menutupi kesenjangan neraca pembayaran karena rendahnya tabungan domestik di negara berkembang dengan mengemukakan bahwa *“developing societies import foreign capital, therefore, because it makes it possible to finance more investment at lower cost than they could finance if they were forced to rely on solely on their domestic saving”*⁷ Namun

pada saat yang sama Oatley juga mengkritisi aliran modal asing ini sebagai faktor yang akan menimbulkan berbagai kesulitan bagi negara penerima. Negara penerima harus melakukan berbagai perombakan kebijakan ekonomi sehingga menarik bagi para investor.

Robert Gilpin mengemukakan bahwa tujuan utama dari FDI oleh perusahaan-perusahaan adalah *“.. is to achieve partial or complete control over marketing, production, or other activities in another economy;...”*⁸ Hal ini menunjukkan bahwa FDI merupakan cara bagi negara maju untuk menguasai perekonomian di negara berkembang. Melalui pendirian anak perusahaan atau cabang perusahaan, para pemilik modal negara maju menguasai kegiatan perekonomian di negara berkembang bahkan terkadang juga memiliki pengaruh

⁷ Thomas Oatley. *International Political Economy Interest and Institution in the Global Economy* 2nd

Edition, (New York : Prentice Education, 2006) hal. 312

⁸ Robert Gilpin, *The Challenge of the World Economy of Capitalism in the 21st Centuries*, (New Jersey : Princeton University Press, 2000

politik yang cukup besar bagi pemerintahan di negara berkembang.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi maupun filosofis para penentang FDI mencoba mengemukakan argumennya yang mengemukakan bahwa FDI juga membawa kesengsaraan bagi negara berkembang. Secara ekonomi diantaranya :

1. Penyediaan modal sejumlah perusahaan multinasional mengakibatkan menurunkan tabungan dan investasi domestik karena persaingan yang tidak sehat sebagai hasil dari perjanjian eksklusif pemerintah dengan para investor
2. Dalam jangka panjang memperburuk deficit neraca transaksi berjalan karena aimpor besar-besaran atas produksi perusahaan multinasional dan juga diperburuk oleh pengiriman keuntungan yang besar ke negara asal.
3. Konsesi pajak yang bersifat liberal, pemberian fasilitas penanaman moodal yang berlebihan, subsidi-subsidi terselubung, serta proteksi tariff yang diberikan pemerintah lebih besar nilai

dibanding kontribusi perusahaan multinasional melalui pajak.

4. Dalam sektor alih teknologi dan kemampuan manajerial, melakukan praktek yang justru menghambat perkembangan keahlian dan manajerial penduduk lokal. Dari sudut pertimbangan ekonomi hal ini wajar karena perusahaan multinasional tidak menginginkan mereka menjadi pesaing. Alih teknologi semakin tidak terjadi karena terjadinya produksi global dimana produksi suatu produk dilakukan di berbagai negara.

Alternatif Bagi Negara

Implikasi yang tidak positif dan tidak sesuai dengan harapan yang telah terjadi dari parktek MNCs ini menimbulkan perdebatan yang panjang terhadap peran negara dalam mengelola FDI. Intisari perdebatan yang terjadi terletak paad perbedaan pandangan mengenai hakikat dan makna dasar dari pembangunan ekonomi serta bagaimana

peran negara dalam meregulasi perkembangan tersebut.

Pihak-pihak yang mendukung penanaman modal swasta asing biasanya merupakan pendukung keberadaan mekanisme pasar bebas, kemandirian perusahaan swasta dan prinsip kebebasan berusaha dengan penghapusan atau peniadakan intervensi dari pemerintah. Sedangkan kelompok teoritis yang cenderung menentang penanaman modal asing mendasarkan sikapnya pada pemikiran dan keyakinan diperlukannya pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah terhadap segenap aktivitas ekonomi dalam wilayah teritorialnya termasuk aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Dimana seluruh upaya pengaturan dan pengawasan tersebut ditujukan agar negara tidak dirugikan baik secara ekonomi maupun sosial.

Diantara kedua pemikiran tersebut muncul pemikiran alternatif yang lebih moderat. Pemikiran ini mengusulkan

diterapkannya suatu pengaturan yang lebih ketat atas penanaman modal asing, posisi negosiasi yang lebih kuat dan seimbang bagi pihak tuan rumah dalam menghadapi perusahaan-perusahaan multinasional namun diiringi dengan peningkatan kinerja dan koordinasi negara berkembang.⁹

Berangkat dari pemikiran moderat yang diajukan oleh Torado diatas penulis mencoba untuk mengaitkannya dengan *Competition State* yang dielaborasi oleh Ian Clark dalam bukunya *“Globalisation and International Relations Theory”*¹⁰.

Berdasarkan pendapat R. Brown mengenai peralihan kekuasaan negara dalam era globalisasi Ian Clark merangkum dua persepsi yang berkembang mengenai hubungan *state* dengan *globalisation*. **Pertama**, globalisasi berimplikasi pada penurunan kapasitas negara sebagai aktor ekonomi. **Kedua**, negara adalah elemen kunci dalam

⁹ Michael P. Todaro, *Op. cit* hal. 158

¹⁰ Penjelasan berikutnya *Competition state*, merujuk pada buku Ian Clark, *Globalisation and International Relation Theory* (Oxford University Press) Hal. 89-106

proses globalisasi, dalam persepsi ini terjadi peralihan dari *state retreat* menjadi *state adaptation*.

Holton mengemukakan bahwa ekonomi global telah mengerosi aspek-aspek tertentu dari kedaulatan nasional tapi tidak mengerosi institusi-institusi *nation state* itu sendiri. Selanjutnya **Cerny**(1990) mengemukakan dalam *competition state*, negara di paksa untuk bertindak lebih dan lebih lagi sebagai pemain pasar. Hal ini cenderung menyebabkan secara keseluruhan kebijakan negara sebagai meminimalisir ketetapan-ketetapan kesejahteraan untuk membuatnya lebih kompetitif secara internasional.

Selanjutnya **Hoogevelt**, berpendapat bahwa fungsi negara telah di lawan, karena itu perlu dilakukan *re-organized* untuk menyesuaikan ekonomi domestik dan kebijakan-kebijakan sosial yang cocok dengan akumulasi pasar global dan kapitalis global. Negara terpaksa bertindak atau berperilaku dalam cara yang

sama untuk alasan-alasan struktural menyesuaikan permintaan-permintaan external dengan ekonomi domestik.

Dengan globalisasi ada kecendrungan bagi negara-negara untuk menjadi instrumen penyesuaian ekonomi mereka terhadap tekana-tekanan pasar dunia. Penyesuaian terhadap kompetisi global adalah kategori baru yang sangat penting. **Ian Clark** menyimpulkan tiga aspek dari globalisasi yang mesti menjadi hirauan negara dalam menghadapi *competition state* :

1. *The drive for international competitiveness.*

Jangkauan kebijakan negara telah dipersempit oleh pentingnya mempertahankan daya kompetisi secara internasional. Hal ini pada gilirannya mendikte kehati-hatian dan pentingnya mengurangi tingkat pinjaman pemerintah seperti hal nya mengurangi pengeluaran publik. Akan tetapi negara memiliki kekuatan sendiri ketika berinteraksi

dengan sistem. Interaksi di sini adalah interaksi dengan negara lain yang mengakibatkan penciptaan sistem negara yang berciri anarki.

Skocpol menyatakan bahwa suatu negara modern selalu menjadi bagian dari sistem persaingan dan yang melibatkan negara-negara. Dalam konteks ini negara memiliki kebanggaan dan hak-hak istimewa prerogatif yang eksklusif dalam menghadapi semua penantang-penantang. Untuk mengendalikan anarkisme sistem negara harus menjadi kuat agar kapasitas negara tidak tererosi sepenuhnya melainkan mencari bentuk lain untuk mengendalikan globalisasi. Kekuatan negara dari dalam terletak pada institusi sosial dari sistem negara itu sendiri dan dari luar negara ditopang oleh persenjataan, kedaulatan, kesamaan dan non intervensi. Negara yang tidak kuat secara institusi internal akan mudah dikendalikan oleh kekuatan eksternal.

2. *The constraint of financial soundness*

Negara yang tidak sukses dalam kompetisi internasional akan menghadapi resiko dibebani oleh tingkat pengeluaran yang tinggi. Pada saat yang sama, pada lingkaran setan ini biaya sosial yang tinggi mengurangi kemampuan untuk bersaing, oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan penampilannya, menurut kriteria yang dapat diterima oleh pasar internasional.

Pendapat ini merujuk kepada argumen Cerny, bahwa negara yang sedang mengalami proses marketisasi untuk mengejar daya kompetitif akan berakibat pada perubahan-perubahan sektor ekonomi kunci yang kurang mampu bersaing. *“government increasingly measure their performance according to criteria acceptable to financial market, is his consideration judgement and accordingly they must be seen as strong our sound if they are to retain the*

confidence of the international financial community".¹¹

Konsekuensi lebih lanjut akan menghasilkan upah yang lebih murah, pajak yang lebih rendah dan negara seakan tidak punya pilihan karena ketakutan akan berpindahnya produksi dan investasi ke tempat lain. Kontrol politik terhadap tingkat suku bunga domestik telah diserahkan kepada bank sentral dan perlengkapan lain yang serupa. Dengan kata lain, *control of economi policy* yang tidak mampu mengatasi kemunduran ditinggalkan dan mengambil bentuk-bentuk lain dari usaha koordinasi internasional yang lebih memusatkan perhatian pada kebijakan moneter dan fiskal. Mereka harus terlihat kuat jika ingin mempertahankan kepercayaan komunitas finansial internasional senada dengan argumen **Cerney** tersebut.

3. *The consequences of capital mobility*

¹¹ *ibid*

Liberalisasi memunculkan ide yang membantu pasar ; tidak adanya kontrol pada aliran modal dan pencegahan terhadap krisis finansial yang besar. Dengan ini berbagai jenis keputusan dan non keputusan negara menciptakan suatu iklim ekonomi yang kondusif terhadap intensifikasi dan integrasi finansial internasional.

Pemerintah nasional tidak dapat mengontrol aliran modal yang melewati batas-batas negara. Karena itu tidak juga bisa mengatur tingkat suku bunga, nilai mata uang yang tetap atau mengejar kebijakan-kebijakan makro ekonomi yang tidak memenuhi pilihan-pilihan pasar. **Andrews** mengemukakan bahwa derajat mobilitas modal antar negara mengakibatkan keputusan kebijakan nasional untuk meliberalisasi pasar finansial domestik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa "*capitalist globalization*" adalah suatu proses yang terjadi didalam, melalui dan di bawah pengawasan negara-negara.

Argumentasi yang mengatakan bahwa kapasitas pengaturan negara telah tererosi oleh proses globalisasi terbantahkan dalam perspektif *state adaptation* ini. Proposisi sentral yang juga mendukung hal ini dikemukakan oleh **Boyer** (1996) :

*“market is not it’s self-regulating mechanism and is it’s self contingent upon political framework put in place by benign public institution. Without this support, the market is not self-sustaining. Thus its argued that policy innovation of the 1980s will in due course be politically tempered by reassertion of new form of state intervention. So that policy become once more embedded in national political preverence”.*¹²

Jadi, dapat disimpulkan globalisasi merupakan paksaan-paksaan eksternal yang mengharuskan negara untuk melakukan penyesuaian bila negara tersebut berkeinginan untuk bertahan dalam kondisi anarkisme sistim ekonomi global. Penyesuaian (*adaptation*) tersebut di lakukan secara struktural yang nantinya berujung pada transformasi atau reformasi kebijakan ekonomi domestik dan luar negeri.

Kesimpulan

FDI menjadi salah satu sumber pembiayaan (modal) yang penting bagi negara berkembang, dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan melalui transfer asset dan manajemen, serta transfer teknologi guna mendorong perekonomian negara. Suatu hal yang harus disadari dalam menilai kontribusi FDI terhadap pembangunan adalah bahwa perhatian perusahaan-perusahaan multinasional

¹² *ibid.*

secara nyata lebih tertuju kepada upaya maksimalisasi keuntungan atau tingkat hasil finansial atas setiap sen modal yang mereka keluarkan. Perusahaan multinasional atau pemilik modal swasta asing tidak tertarik untuk menunjang usaha pembangunan yang tidak akan memberikan keuntungan bagi mereka. Implikasi yang tidak positif dan tidak sesuai dengan harapan yang telah terjadi dari parktek FDI yang diwujudkan dalam operasi MNCs ini menimbulkan perdebatan yang panjang terhadap peran negara dalam mengelola FDI. Intisari perdebatan yang terjadi terletak paad perbedaan pandangan mengenai hakikat dan makna dasar dari pembangunan ekonomi serta bagaimana peran negara dalam meregulasi perkembangan tersebut.

Disamping adanya pandangan yang mendukung FDI dan ada pandangan yang menentang FDI, penulis mencoba mengetengahkan pemikiran alternative yang lebih moderate dimana negara tetap membuka ekonominya untuk menerima

arus masuk modal asing karena kebutuhan pembangunan namun negara juga harus meningkatkan kapasitasnya dan berusaha menjadi negara *as competitor*. Dalam hal ini, negara harus berusaha untuk beradaptasi dan menjadi dengan malkukan penguatan daya saing dalam negeri.

Referensi

- Kavaljit Singh, *Memahami Globalisasi Keuangan, Panduan untuk Memperkuat Rakya*, Terj.Fredrick Ruma (Jakarta : Yakoma-PGI, 1998)
- George C. Lodge, George C. Lodge, *Managing Globalization in The Age of Interdependence* (Johannesburg : Pfeiffer Company)
- Torado, Michael P. 1998. *Economic Development/sixth edition*. Terj. Haris Munandar. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Jakarta : Erlangga)
- Thomas Oatley. *International Political Economy Interest and Institution in the*

Global Economy 2nd Edition, (New York :
Prentice Education, 2006)

Robert Gilpin, *The Challenge of the World
Economy of Capitalism in the 21st*

Centuries, (New Jersey : Princeton
University Press, 2000)

Ian Clark *Competition state, Globalisation
and International Relation Theory* (
Oxford University Press)